

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN ANGGARAN 2017



**BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU
DI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) Tahun. Format penyusunan Renja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Bengkulu No. 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan surat edaran penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2017. Pembuatan Rencana Kerja juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang digariskan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015 dan Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015

Rencana Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mendukung program Pemerintah Provinsi Bengkulu dan dapat disinergikan dengan program dan kegiatan SKPD lainnya secara global.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 ini dan semoga dapat memberikan manfaat dalam berkarya dan berinovasi dalam pembangunan guna memajukan Provinsi Bengkulu yang kita cinta ini.

Jakarta, 31 Mei 2016

Ketua Kantor Perwakilan
Pemerintah Provinsi Bengkulu



Drs. Khairil Anwar, M.Si

NIP. 19711031 199101 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu.	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu	5
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	8
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu	8
3.3 Program dan Kegiatan	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta Pencapaian Renstra Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta S/D Tahun 2016
- Tabel 2.2 : CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI JAKARTA
- Tabel 3.1 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI JAKARTA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendukung keakuratan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun diperlukan suatu dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang dikenal dengan Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja OPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) Tahun . Rencana Kerja OPD yang akan disingkat dengan Renja untuk Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021. Kebijakan, Program Kerja dan Kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Tahun 2016-2021 menjadi dasar dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja, penyusunan rancangan RENJA yang meliputi penyampaian rancangan RENJA, Verifikasi rancangan RENJA, Penyusunan Rancangan Akhir RENJA dan Penetapan RENJA.

Keterkaitan RENJA Tahun 2017 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat dari 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan Kerja yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung;
15. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pengendalian program kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta agar

bermanfaat bagi aparatur Badan Penghubung dalam menyelenggarakan pembangunan;

2. Membangun sistem perencanaan yang mandiri, terpadu, inovatif dan profesional melalui pengembangan dan peningkatan penyusunan program kerja Badan Penghubung;
3. Memberikan rambu-rambu dalam pembinaan teknis dan administrasi program Badan Penghubung.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu mengikuti Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dari penyusunan RENJA Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2017.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI JAKARTA TAHUN 2015

Bab II memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2015 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab III berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Bab IV ini berisikan kesimpulan bahwa dokumen RENJA ini harus dijadikan panduan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya.

BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2015 juga harus dievaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2015 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD

Untuk seluruh program/kegiatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 memiliki 7 (tujuh) indikator. Pada tahun 2017 target dari 7 program/kegiatan untuk terealisasi 100% tidak tercapai.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta mengemban visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu sesuai tugas dan fungsinya. Dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 tersebut,

isu-isu penting yang dihadapi oleh Badan Penghubung adalah sebagai berikut:

1. Badan Penghubung ke depan akan memiliki fungsi sebagai sumber informasi mengenai Provinsi Bengkulu secara komprehensif;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: masalah kelembagaan yang masih memerlukan penataan, kualitas sumber daya manusia Badan Penghubung yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsinya masih cukup rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai (antara lain ruang kerja Badan Penghubung yang luasnya kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah staf yang ada), serta koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait harus lebih ditingkatkan dalam rangka melakukan pelayanan prima terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pejabat daerah dan anggota DPRD.
3. Badan Penghubung yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta, dalam menjalankan visi dan misinya harus senantiasa berpedoman pada visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 adalah:

"Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi"

Sedangkan misi RPJMD tahun 2016-2021 terdiri dari 17 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government)

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan social dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local.
3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integrative dan berdaya saing.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya dan demokratis.

Visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta. Secara spesifik, misi RPJMD yang terkait langsung dengan misi Badan Penghubung adalah:

Misi I: Meningkatkan Promosi Potensi Daerah Bengkulu Diluar Provinsi Bengkulu

Tujuan:

- Mendukung Peningkatan Daya Saing dan Iklim Investasi Daerah

Sasaran :

- Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintahan Daerah

Strategi:

- Optamilisasi Informasi dan Promosi Daerah Bengkulu
-

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan Kuantitas Promosi diluar Provinsi Bengkulu
- Peningkatan Pengelolaan Anjungan Bengkulu TMII sebagai bagian dari Promosi Provinsi Bengkulu

Misi II : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

Tujuan :

- Mewujudkan clean dan good governance

Sasaran :

- Tercapainya Pelayanan Prima disegala Bidang dan Sektor
- Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun

Strategi:

- Mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- Menciptakan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional

Arah Kebijakan:

- Membangun kinerja aparatur yang akuntabel
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Penunjang untuk Mendukung Kinerja Aparatur yang Profesional
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
- Meningkatkan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badan Penghubung.

Misi III : Meningkatkan hubungan dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga non-Pemerintah

Tujuan :

- Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta

Sasaran :

- Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

Strategi :

- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan kepada Unsur Pimpinan Daerah dan SKPD selama Pelaksanaan Tugas di Luar Propinsi Bengkulu

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Pembangunan
- Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan DPRD dan SKPD
- Mengoptimalkan dan Memperluas Sumber dan Jenis Pendapatan daerah
- Meningkatkan Pelayanan Informasi bagi Masyarakat Bengkulu di Jakarta.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi pokok Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman, menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat berdasarkan pada RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Bengkulu di Jakarta

Misi I: Meningkatkan peran Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di

Jakarta untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan peran Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah.

b. Sasaran

Terwujudnya promosi untuk pengembangan dan pembangunan daerah.

Misi II: Meningkatkan kinerja aparatur yang profesional dan
Pelayanan prima

- a. Tujuan
Mewujudkan *clean* dan *good governance*
- b. Sasaran
 - Tercapainya pelayanan prima di segala bidang/sector
 - Terus meningkatnya nilai LAKIP OPD dari tahun ke tahun

Misi III: Meningkatkan koordinasi terhadap hubungan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah, Departemen dan Non Departemen, Lembaga Swasta dan masyarakat asal Provinsi Bengkulu di Jakarta dan sekitarnya.

- a. Tujuan
Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga pemerintah dan swasta
- b. Sasaran
Terciptanya hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2017 dibuat sesuai dengan visi dan misi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berhubungan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu periode 2015-2020. Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2017 bisa dilihat dalam lampiran Tabel 3.1

BAB. IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta (RENJA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu) Tahun 2017 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta untuk Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2017 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RENJA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu Tahun 2017, akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENJA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2017 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

RENJA Badan Penghubung Provinsi Bengkulu Tahun 2017 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) tahunan tahun 2017, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2017 yang akan datang.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta
Pencapaian Renstra Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta S/D Tahun 2014
Provinsi Bengkulu

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu) Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2014			Target Program/Kegiatan (Renja Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kantor	
					Target Renja SKPD Tahun 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20 08 16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah									
1.20 08 16 08	Pendampingan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah / Kepala Daerah	0	2x	2x	2x	100%	0%	100%	100%
1.20 08 25	PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH									
1.20 08 25 07	Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu se-Jabodetabek	Jumlah Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu se-Jabodetabek	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.20 08 25 07	Stimulus (bantuan) Mudik bersama	Jumlah Stimulus (bantuan) Mudik bersama	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.20 08 25 08	Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta	Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.20 08 65	PELESTARIAN SENI BUDAYA, WISATA BENGKULU (PAKET SENI BUDAYA)									
1.20 08 65 02	Pergelaran Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu	Jumlah Pergelaran Seni Budaya Propinsi Bengkulu	60 Paket	48	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	100%
1.20 08 65 03	Partisipasi Propinsi Bengkulu Dalam Mengikuti Pameran	Bengkulu Dalam Mengikuti Pameran	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%

Jakarta, 31 Mei 2016
KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU,



Dr. Khairil Anwar, M.Si
 NIP. 19711031 199101 1 001

TABEL 2.2
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
PROVINSI BENGKULU


No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	2017	2018	
1	2	3	4	6	7	8		8	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			80 pendampingan	60 Pendampingan	60 pendampingan	60 pendampingan	60 pendampingan	60 pendampingan	1x	80 pendampingan	60 Pendampingan	60 pendampingan	
2	Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta			80 pendampingan	60 Pendampingan	60 pendampingan	60 pendampingan	60 pendampingan	60 pendampingan	120 pendampingan	80 pendampingan	60 Pendampingan	60 pendampingan	
3	Jumlah Masyarakat Bengkulu di Jakarta yang hadir pada Kegiatan Halal Bihalal			-	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	1000 orang	-	-	500 orang	
4	Jumlah Paggelaran Seni Budaya Prop.Bengkulu di Jakarta			10 pagelaran / even	13 pagelaran / even	13 pagelaran / even	13 pagelaran / even	13 pagelaran / even	13 pagelaran / even	11 pagelaran / even	10 pagelaran / even	13 pagelaran / even	13 pagelaran / even	
5	Jumlah Parstisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi Daerah			-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	
6	Jumlah Parstisipasi Prop.Be Dalam Mengikuti Pameran			-	-	1 Pameran	1 Pameran	1 Pameran	1 Pameran	-	-	1 Pameran	1 Pameran	

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI JAKARTA TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PROVINSI BENGKULU

KODE REKENING	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Dana Tahun 2016	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Dana Pagu Indikatif	
						(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.20	1.20	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.168.958.000		3.466.428.000		2.269.422.000	
1.20	1.20	08	01	xx	Peny Jasa Surat menyurat	Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	Jakarta	250 surat / 50 paket pengiriman	15.000.000	APBD	20.000.000	250 surat / 50 paket pengiriman	16.500.000
1.20	1.20	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan tagihan telp air dan listrik	Jakarta	12 bulan	370.560.000	APBD	670.560.000	12 bulan	407.616.000
1.20	1.20	08	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah gedung yang menjadi jaminan milik daerah	Jakarta	2 gedung	60.000.000	APBD	60.000.000	2 unit	66.000.000
1.20	1.20	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jangka waktu pelaksanaan admn keuangan	Jakarta	12 bulan	-	APBD	95.520.000	12 bulan	-
1.20	1.20	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang dibiayai	Jakarta	13 OB	312.000.000	APBD	264.000.000	12 bulan	343.200.000
1.20	1.20	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jangka waktu pemakaian ATK kantor	Jakarta	12 bulan	75.000.000	APBD	75.000.000	31 jenis	82.500.000
1.20	1.20	08	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	7 Cetak / 1500 lembar	65.000.000	APBD	75.000.000	41568	71.500.000
1.20	1.20	08	01	12	Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor	Jumlah komponen Listrik Gedung kantor	Jakarta	8 jenis	60.000.000	APBD	80.000.000	7 jenis	66.000.000
1.20	1.20	08	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga	Jakarta	14 jenis	98.460.000	APBD	128.460.000	14 jenis	108.306.000
1.20	1.20	08	01	xx	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan, media lokal dan nasional	Jakarta	14 jenis	10.000.000	APBD	25.950.000	14 jenis	11.000.000
1.20	1.20	08	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Jakarta	12 bulan	60.000.000	APBD	360.000.000	1 Tahun	66.000.000
1.20	1.20	08	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jangk a waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Jakarta	86 kali	433.938.000	APBD	483.938.000	105 kali	300.000.000
1.20	1.20	08	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jangka Waktu Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jakarta	12 bulan	609.000.000		1.118.400.000	16 jenis	730.800.000
1.20	1.20	08	01	22	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah	Jangk a waktu pelaksanaan penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah	Jakarta	12 bulan	-	APBD	9.600.000	14 jenis	-
1.20	1.20	08	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.054.908.000		1.326.150.000		3.325.759.600
1.20	1.20	08	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas	Jakarta	3 unit	20.000.000	APBD	40.000.000	0	1.100.000.000
1.20	1.20	08	02	09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Jakarta	10 jenis	174.300.000	APBD	179.300.000	34 unit	197.230.000

KODE REKENING				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Dana Tahun 2016	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Dana Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1.20	1.20	08	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH				180.000.000		321.000.000	198.000.000		
1.20	1.20	08	16	08	Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Unsur Muspida	Jakarta	60 pendampingan	180.000.000	APBD	321.000.000	60 pendampingan	198.000.000
													-
1.20	1.20	08	25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH				88.000.000		635.500.000	96.800.000		
1.20	1.20	08	25	07	Halal-Bihalal Masyarakat Bengkulu se-JABODETABEK	Jumlah Pelaksanaan Halal Bihalal	Jakarta	1 Kali	-	APBD	244.600.000	1 kali	-
1.20	1.20	08	25	08	Stimulus (bantuan) Mudik Bersama	Jumlah peserta stimulus (bantuan) Mudik	Jakarta	200 Org	-	APBD	190.900.000	150 Org	-
1.20	1.20	08	25	09	Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta	Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta	Jakarta	60 pendampingan	88.000.000		200.000.000	60 pendampingan	96.800.000
													-
1.20	1.20	08	46	PROGRAM PROMOSI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU				710.000.000		911.000.000	938.740.000		
1.20	1.20	08	46	01	Pergelaran Seni Budaya Provinsi Bengkulu di Jakarta	Jumlah Pagelaran Seni Budaya Propinsi Bengkulu di Jakarta	Jakarta	14 Paket	566.600.000	APBD	566.600.000	14 Paket	623.260.000
1.20	1.20	08	46	02	Partisipasi Badan Penghubung Dalam Mengikuti Promosi Daerah	Jumlah Partisipasi Badan Penghubung Dalam Mengikuti Promosi Daerah	Jakarta	1 kegiatan	143.400.000	APBD	344.400.000	3 event	157.740.000
				03	Partisipasi Badan Penghubung dalam Mengikuti Pameran	Jumlah Partisipasi Badan Penghubung dalam Mengikuti Pameran	Jakarta	1 pameran	-	APBD	-	1 pameran	157.740.000
JUMLAH								4.281.866.000		6.954.728.000		6.951.721.600	

Catatan :
: Kegiatan baru

Jakarta, 31 Mei 2016
KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU,

Drs Khairil Anwar, M.Si
 NIP. 19711031 199101 1 001